



BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur seluas 211.440 Km² atau seluas satu setengah kali dari pada luas Pulau Jawa dan Madura. Jumlah penduduk sampai tahun 2011 tercatat 3.621.598 jiwa, berarti rata-rata kepadatan penduduk Kalimantan Timur yaitu 17,12 jiwa/Km². Hal yang berkenaan dengan kondisi kependudukan di Kalimantan Timur ini adalah distribusi penduduk yang tidak merata, dimana hampir sebagian besar penduduk berada di daerah perkotaan, disamping pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sebagai akibat migrasi (perpindahan penduduk).

Mengingat letaknya diwilayah khatulistiwa, maka Kalimantan Timur memiliki karakteristik iklim/ cuaca dengan curah hujan turun merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat perbedaan yang tegas antara musim kemarau dengan musim hujan. Curah hujan tertinggi 5.382 mm per tahun terjadi di Kota Tarakan sedangkan terendah 1.054 mm terdapat di Kota Balikpapan (Sumber data Sekunder BPS, 2011)

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat yang dalam periode 2006 – 2012 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi. Produksi dan luas areal diperkirakan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni masyarakat, bantuan pemerintah maupun perusahaan swasta perkebunan (PBS).



Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Luas areal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,22 persen setiap tahun, sedangkan produksi sebesar 30,76 persen setiap tahun. Luas areal pada tahun 2008 mencapai 591.222 Ha dan meningkat menjadi 1.074.672 Ha pada tahun 2012 (angka sementara), sedangkan jumlah produksi dari 1.786.540 ton pada tahun 2008 menjadi 5.129.048 pada tahun 2012 (angka sementara).

Luas areal perkebunan periode 2008-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 483.450 Ha (16,22 persen) dari 591.222 ha pada tahun 2008 menjadi 1.074.672 ha pada tahun 2012, peningkatan terbesar terjadi pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) 311.393 ha pada tahun 2008 menjadi 725.683 ha pada tahun 2012 sehingga terdapat peningkatan luas areal sebesar 414.290 ha (133,04 persen)

Perkebunan Rakyat (PR) dari 263.582,50 ha (2008) menjadi 324.848 ha pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan seluas 61.265,50 ha (23,24 persen).

Beberapa Komoditi Unggulan yang mengalami penambahan areal cukup besar meliputi :

- **Kelapa Sawit** pada tahun 2008 seluas 409.564,00 ha meningkat pada menjadi 907.017 ha yang artinya mengalami peningkatan seluas 376.463 ha atau 91,99 persen (angka sementara tahun 2012);
- **Kakao** mengalami penurunan luas areal sebesar 9.653 ha dari 34.591 ha pada tahun 2008 menjadi 24.938 ha pada tahun 2012 (angka sementara tahun 2012);
- **Karet** mengalami kenaikan luas sebesar 11.261 ha, dimana pada tahun 2008 74.672 Ha sedangkan tahun 2012 yang luasnya sebesar 85.933 ha, kenaikan luas areal tersebut dikarenakan terlaksananya program revitalisasi pada komoditi ini (angka sementara tahun 2012);



- Luas tanaman **Lada** pada tahun 2008 tercatat seluas 14.843 ha menurun menjadi 11.118 ha pada tahun 2012 yang berarti mengalami penurunan seluas 3.725 ha.
- Tanaman **Kelapa Dalam** di Kalimantan Timur pada tahun 2008 seluas 33.416 ha sedangkan tahun 2012 menjadi 31.031 ha artinya mengalami penurunan luas areal sebesar 2.385 ha. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya penanaman baru pemeliharaan tanaman tidak maksimal.

1. Dasar Hukum

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur .Landasan hukum yang mendasari adalah undang – undang RI Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 04 tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan **Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur** yang terdiri dari :

- **Susunan Kepegawaian**

Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah terbentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - ◆ Sub. Bagian Perencanaan Program
 - ◆ Sub. Bagian Umum



◆ Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang- Bidang :

◆ Bid. Pengembangan

- Sie. Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
- Sie. Pengembangan dan Perluasan areal
- Sie. Penataan Kelembagaan dan SDM Petani

◆ Bid. Produksi

- Sie. Bahan Tanaman
- Sie. Budidaya Tanaman
- Sie. Teknologi Alat dan Mesin

◆ Bid. Usaha

- Sie. Administrasi Perijinan
- Sie Pembinaan Usaha
- Sie. Standarisasi Mutu dan Pemasaran produk

◆ Bid. Perlindungan

- Sie. Sarana Perlindungan dan Perkebunan
- Sie. Sarana Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian. OPT
- Sie. Konservasi Tanah dan Air

d. UPTD :

◆ UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)

- Sie. Pengujian dan Sertifikasi Benih
- Sie. Pengawasan dan Peredaran Benih
- Sub. Bagian Tata Usaha

◆ UPTD. Teknologi Terapan Perkebunan (T2P)

- Sie. Teknologi Terapan Tanaman Tahunan
- Sie. Teknologi Terapan Tanaman Semusim
- Sub. Bagian Tata Usaha

◆ UPTD. Pengemb. Perlindungan Tanaman Perkebunan

- Sie. Pengemb. Pengendalian Hama dan Gulma
- Sie. Pengemb. Pengendalian Penyakit
- Sub. Bagian Tata Usaha



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktur dan Fungsional.

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 118 Orang

Pendidikan S3	:	1	Orang
Pendidikan S2	:	15	Orang
Pendidikan S1	:	46	Orang
Pendidikan DIII	:	4	Orang
Pendidikan DI	:	3	Orang
Pendidikan SLTA	:	46	Orang
Pendidikan SLTP	:	3	Orang

b. Pangkat dan Golongan

IV/d	:	1	Orang
IV/c	:	1	Orang
IV/b	:	6	Orang
IV/a	:	8	Orang
III//d	:	22	Orang
III/c	:	12	Orang
III/b	:	28	Orang
III/a	:	6	Orang
II/d	:	8	Orang
II/c	:	6	Orang
II/b	:	12	Orang
II/a	:	5	Orang
I/d	:	3	Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat Struktural	:	33	Orang
Pejabat Fungsional	:	13	Orang



C. Visi Misi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Terwujudnya Perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan”

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Mendorong berkembangnya usaha perkebunan yang efisien, produktif dan mampu memberikan jaminan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan dan kebun secara profesional dan lestari.
4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dari jabaran Visi dan Misi diatas dapat diperoleh gambaran kebijakan pembangunan sub sektor Perkebunan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (capital Intensif) dan sektor ekonomi yang padat kerja (labour intensif) dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah disesuaikan dengan keunggulan komparatif daerah.
3. Membangun sektor perkebunan yang tangguh dengan mengembangkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keunggulan kompetitif (competitif advantages) yang berbasis agroindustri.
4. Mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang dapat menghasilkan barang setengah jadi sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri hulu hilir melalui cara-cara :
 - a. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan;



- b. penerapan teknologi pengolahan hasil produk perkebunan;
- c. pemberdayaan penyuluh lapangan.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan perkebunan diarahkan pada upaya untuk menggerakkan dan memfasilitasi peningkatan produksi dan pengembangan produk perkebunan yang berorientasi pada pasar melalui peningkatan daya kreasi, inovasi dan partisipasi masyarakat melalui :

1. Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomis tinggi
 - Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah sebagai pengembangan yang produktif guna terwujudnya lahan perkebunan 1 juta hektar kelapa sawit.
 - Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan daerah sekitarnya.
2. Peningkatan mutu dan kualitas serta pemasaran hasil produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
 - Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan yang didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai terutama pada sektor pendidikan yang berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan).
 - Peningkatan penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.
 - Peningkatan pengelolaan komoditas perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).
 - Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan.



BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA

1. Program dan Kegiatan Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2009 – 2013 beserta target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN/BLN, APBD I dan APBD II, dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan anggaran yang cukup berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut .

a. Program

- a. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- c. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- e. Peningkatan Disiplin Aparatur
- f. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- g. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
- h. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- i. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- j. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- k. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- l. Peningkatan Kesejahteraan Perkebunan

b. Kegiatan Kerja

Kegiatan Pokok dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan meliputi :

- a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Penyusunan Data Base potensi produksi pangan
- c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan



- d. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
- e. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
- f. Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah perkebunan
- g. Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian / perkebunan masyarakat
- h. Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan waralaba, Penyusunan RKDK pupuk dan inventarisasi plasmanuftah
- i. Pengembangan dan Operasional PIR swadaya dan Kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat
- j. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan
- k. Pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan
- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
- m. Uji bahan pengendali penyakit, hama dan Patogen pada tanaman perkebunan
- n. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Pada tahun 2012, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti tertera di dalam lampiran Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah ini.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2012, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 47.122.277.000,- dan realisasi hingga akhir 2012 adalah sebesar 41,713,685,676 atau 88,52 %, sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 1. Rincian APBD dan Realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			
a.	Penyusunan Database potensi produksi pangan	1,682,240,000	1,470,165,800	87.39
b.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	762,000,000	669,573,400	87.87
c.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	2,032,800,000	1,936,159,865	95.25
d.	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	738,600,000	713,873,900	96.65
	T O T A L	5,215,640,000	4,789,772,965	91.83
II	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			
a.	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	893,000,000	801,615,925	89.77
b.	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Perkebunan	350,000,000	238,256,300	68.07
c.	Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat	600,000,000	519,394,200	86.57
	T O T A L	1,843,000,000	1,559,266,425	84.60
III	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
a.	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	1,736,500,000	1,467,372,025	84.50
b.	Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitran Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	15,205,550,000	13,301,409,875	87.48
	T O T A L	16,942,050,000	14,768,781,900	87.17
IV	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan			
a.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	266,750,000	221,164,800	82.91
b.	Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	499,723,050	343,660,200	68.77
	T O T A L	766,473,050	564,825,000	73.69



Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda - Kaltim **2012**

V	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			
	a. Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama & Patogen pada Tanaman Perkebunan	1,435,580,000	1,348,995,650	93.97
	b. Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	996,650,000	925,529,000	92.86
	T O T A L	2,432,230,000	2,274,524,650	93.52
VI	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1,554,100,000		
	a. <i>Belanja Tidak Langsung UPTD PBP</i>	697,500,000	660,150,000	94.65
	b. <i>Belanja Langsung Rutin UPTD PBP</i>	856,600,000	671,768,300	78.42
	- Program pelayanan adm perkantoran	396,200,000	296,811,300	74.91
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	232,000,000	197,077,000	84.95
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	11,900,000	11,730,000	98.57
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	95,000,000	68,350,000	71.95
	-Prog. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	121,500,000	97,800,000	80.49
	T O T A L	1,554,100,000	1,331,918,300	85.70
VII	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			
	a. <i>Belanja Tidak Langsung UPTD P2TP</i>	754,500,000	669,388,000	88.72
	b. <i>Belanja Langsung Rutin UPTD P2TP</i>	1,075,030,000	919,943,219	85.57
	- Program pelayanan adm perkantoran	575,180,000	471,495,210	81.97
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	253,200,000	241,529,909	95.39
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	13,650,000	10,995,600	80.55
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	116,000,000	89,722,500	77.35
	-Prog. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	117,000,000	106,200,000	90.77
	T O T A L	1,829,530,000	1,589,331,219	86.87
VIII	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan			
	a. <i>Belanja Tidak Langsung UPTD PT2P</i>	518,700,000	498,455,000	96.10
	b. <i>Belanja Langsung Rutin UPTD PT2P</i>	1,345,675,000	1,226,868,722	
	- Program pelayanan adm perkantoran	486,800,000	429,240,862	88.18
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	632,775,000	613,340,360	96.93
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	9,100,000	9,100,000	100.00
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	100,000,000	59,387,500	59.39
	-Prog. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	117,000,000	115,800,000	98.97
	T O T A L	1,864,375,000	1,725,323,722	92.54
IX	Dinas Perkebunan Provinsi (Sekretariat)			
	a. <i>Belanja Tidak Langsung</i>	9,136,077,000	8,591,573,122	94.04
	b. <i>Belanja Langsung</i>	5,538,801,950	4,518,368,373	81.58
	- Program pelayanan adm perkantoran	2,225,551,950	1,889,745,791	84.91
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	2,554,400,000	1,963,364,400	76.86
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	93,800,000	49,896,000	53.19
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	239,650,000	206,762,182	86.28
	-Prog. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	425,400,000	408,600,000	96.05
	T O T A L	14,674,878,950	13,109,941,495	89.34
		47,122,277,000	41,713,685,676	88.52



4. Perencanaan Pembangunan

Secara keseluruhan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan sasaran pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan lahan perkebunan yang terdiri dari :
 - a. 1 juta Ha lahan Kelapa Sawit ;
 - b. 250.000 Ha yang meliputi komoditi Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Lada dan aneka tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha industri dan aparatur pembina, pengembangan pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat jangka pendek dan menengah.
3. Menciptakan iklim investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hilir yang bahan bakunya telah tersedia seperti CPO dan lain-lain.
4. Pengembangan Perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomis tinggi
5. Peningkatan mutu dan kualitas serta pemasaran hasil produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

5. Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kantor Dinas yang terdiri dari :

- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
- UPTD Teknologi Terapan Perkebunan
- UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- Stasiun Lada KM. 41 Loa Janan
- Gedung UPP PIR Swadaya Samboja dan Muara Badak
- UPP PRPTE di 14 Kecamatan



Prasarana berupa mobilitas atau kendaraan dinas yang berjumlah 13 Unit

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2012 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan tehnis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah.
Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
2. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
3. Para Petugas Lapangan (PPL) PIR Swadaya belum adanya sinkronisasi data dan pemahaman yang memadai tentang perkebunan PIR Swadaya, tahapan-tahapan pengembangan sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program.
4. Dalam distribusi bantuan petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Masih beredarnya bibit sawit palsu (tidak bersertifikat) di perkebunan rakyat yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani pekebun terhadap bibit sawit palsu

Upaya Penyelesaian Masalah

1. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar- penagkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit



dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar penagkar tersebut.

2. Perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
3. Petugas Perkebunan intensif melakukan pendampingan, pengawasan kepada petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada tingkat lapang dan kelompok tani di lapangan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
5. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
6. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan teknis PIR Swadaya.
7. Mekanisme penyusunan anggaran selalu dihadiri oleh instansi yang membidangi panggar eksekutif dan komisi legislatif bersama dengan yang mengajukan anggaran baik secara formal maupun informal.
8. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)
9. Mensosialisasikan kepada petani pekebun perbedaan antara bibit sawit asli dan bibit sawit palsu, sehingga petani pekebun memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat memilih benih sawit dengan benar dan tepat sasaran.



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

A. Dasar Hukum dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh dana APBN Kementerian Pertanian, terdiri dari :

- Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Nomor DIPA : 6167/018-05.3.01/19/2012 dan 6167/018-05.4.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan Nomor DIPA : 5145/018-07.3.01/19/2012 dan 5145/018-07.4.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor DIPA : 5146/018-08.3.01/19/2012 dan 5146/018-08.4.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2012

B. Program dan Kegiatan

- Program

1. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Direktorat Jenderal Perkebunan)
2. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian (Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian)
3. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

- Kegiatan Kerja

- Direktorat Jenderal Perkebunan
 - a. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
 - b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim



- c. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan
- d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
- e. Dukungan Perlindungan Perkebunan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - a. Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
 - b. Pengembangan Pemasaran Domestik
 - c. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
 - d. Pengembangan Mutu dan Standarisasi
 - e. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - b. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
 - c. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - d. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Direktorat Jenderal Perkebunan

Pada Tahun 2012, Program dalam Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan realisasi output kegiatan sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 2 Realisasi Output Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar		
	a. Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Rempah dan Penyegar	1 Kabupaten	-
	b. Dukungan Gernas Kakao	100 Ha	100 Ha
2	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim		
	a. Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	1 Perlombaan	1 Perlombaan
3	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan		
	a. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit	250 Ha	-
	b. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Tahunan	200 Orang	200 Orang
	c. Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	3 Kabupaten	2 Kabupaten
	d. Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	e. Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
4	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan		
	a. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan	1 Alat	1 Alat
	b. Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	13 Kabupaten	13 Kabupaten
	c. Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
5	Dukungan Perlindungan Perkebunan		
	a. Pengendalian OPT Tanaman perkebunan	50 Orang	50 Orang
	b. Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun	4 Kabupaten	4 Kabupaten
	c. SL-PHT Perkebunan	2 Keltan	2 Keltan
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

2. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Kegiatan pameran-pameran yang diikuti dengan pembiayaan dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, sebagai berikut :

- Agro and Food Expo di Jakarta



- Indonesia Agribusiness Expo di Surabaya
- Batam Agribusiness Expo di Batam
- Investment Forum di Belanda

Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian maka diserahkan alat pengolah hasil perkebunan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Kutai Timur, yaitu : Mesin Pemecah Buah Kakao, Peti Fermentasi Biji Kakao, Mesin Sortasi Biji Kakao, Mesin Pengering Berputar, Alat Ukur Kadar Air Digital, Alat Moisture Meter dan Alat Tester Temperatur.

3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan kegiatan Bantuan Sosial kepada Kelompok Tani di :

- Kab.Kutai Kartanegara berupa : Pengembangan Sumber Air sebanyak 3 paket, Konservasi Air (Embung) sebanyak 3 Unit, Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi) sepanjang 5 Km dan Perluasan areal Perkebunan tanaman karet seluas 50 (lima puluh) ha.

D. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran yang diberikan

Jumlah Anggaran yang diterima Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dari APBN (DK dan TP Provinsi) adalah sebesar Rp. 13.071.673.000,- dengan sumber dana, pagu anggaran dan realisasi seperti tercantum pada tabel 3.

Tabel 3 Pagu Anggaran dan Realisasi Dana APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN			
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK	1,526,349,000	1,015,665,050	66.54
	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU			
	TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	1,526,349,000	1,015,665,050	66.54
	Dukungan Perlindungan Perkebunan	104,500,000	103,662,000	99.20
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			
		1,421,849,000	912,003,050	64.14



Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda - Kaltim 2012

	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) TP	7,451,102,000	4,858,622,380	65.21
	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU	7,451,102,000	4,858,622,380	65.21
	TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	2,504,842,000	1,941,661,600	77.52
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	40,000,000	35,277,000	88.19
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	3,068,633,000	1,494,333,600	48.70
	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	726,455,000	488,413,900	67.23
	Dukungan Perlindungan Perkebunan	904,202,000	773,616,380	85.56
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	206,970,000	125,319,900	60.55
	JUMLAH SATKER (05) TP PROV.	7,451,102,000	4,858,622,380	65.21
	JUMLAH SATKER (05) DK + TP PROV	8,977,451,000	5,874,287,430	65.43
B	DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) DK	1,626,700,000	1,343,221,011	82.57
	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN			
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	1,076,700,000	859,061,011	79.79
	Pengembangan Pemasaran Domestik	150,000,000	116,571,100	77.71
	Pengembangan Pemasaran Domestik	142,600,000	89,795,500	62.97
	Pengembangan Usaha dan Investasi	341,300,000	304,629,911	89.26
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	442,800,000	348,064,500	78.61
	JUMLAH SATKER (07) DK	1,076,700,000	859,061,011	79.79
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) TP	550,000,000	484,160,000	88.03
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	400,000,000	382,720,000	95.68
	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	150,000,000	101,440,000	67.63
	JUMLAH SATKER (07) TP	550,000,000	484,160,000	88.03
	JUMLAH SATKER (07) DK + TP PROV.	1,626,700,000	1,343,221,011	82.57
C	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) DK	1,257,522,000	959,935,464	76.34
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,152,522,000	911,918,464	79.12
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	30,000,000	6,000,000	20.00
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	75,000,000	42,017,000	56.02
	JUMLAH SATKER (08) DK	1,257,522,000	959,935,464	76.34
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) TP	1,210,000,000	1,210,000,000	100.00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	1,210,000,000	1,210,000,000	100.00
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	360,000,000	360,000,000	100.00
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	850,000,000	850,000,000	100.00
	JUMLAH SATKER (08) TP	1,210,000,000	1,210,000,000	100.00
	JUMLAH SATKER (08) DK + TP PROV.	2,467,522,000	2,169,935,464	87.94



E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

1) Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05)

Dasar Hukum sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5520/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 562/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 17 Februari 2012 Tentang Perubahan Lampiran.
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/005/V-KEU tanggal 14 Desember 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/021/V-Keu tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Perubahan Keputusan
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/977/Kpts-Satker/2012 tanggal 13 Pebruari 2012

Jumlah Pegawai untuk Satker Ditjenbun (05) berjumlah Delapan (8) orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 3 orang dan SMA sebanyak 3 orang. Untuk Golongan IV/b sebanyak 1 orang, Golongan III/d sebanyak 2 orang, , golongan III/b sebanyak 3 orang dan Golongan II/b sebanyak 2 orang.

2) Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (Satker 07)

Dasar Hukum sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5584/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 722/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Perubahan Lampiran
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/005/V-KEU tanggal 14 Desember 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/021/V-Keu tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Perubahan Keputusan
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/068/Kpts-Disbun/2012 tanggal 15 Pebruari 2012

Jumlah Pegawai untuk Satker Ditjen P2HP (07) berjumlah 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 4 orang. Untuk Golongan IV/b sebanyak 1 orang, Golongan III/d sebanyak 2 orang, Golongan III/b sebanyak 3 orang, Golongan III/a



sebanyak 1 orang, Golongan II/c sebanyak 1 orang dan Golongan II/b sebanyak 2 orang.

3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08)

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5616/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2867/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Perubahan Lampiran
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/005/V-KEU tanggal 14 Desember 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/021/V-Keu tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Perubahan Keputusan
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/278/Kpts-Disbun/2012 tanggal 3 September 2012

Jumlah Pegawai untuk Satker Ditjen PSP (08) berjumlah 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 3 orang. Untuk Golongan IV/b sebanyak 1 orang, Golongan IV/a sebanyak 1 orang, Golongan III/d sebanyak 2 orang, Golongan III/c sebanyak 1 orang, Golongan III/b sebanyak 1 orang, Golongan III/a sebanyak 1 orang, Golongan II/c sebanyak 1, Golongan II/b sebanyak 1 orang dan Golongan II/a sebanyak 1 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten terhadap kegiatan di APBN, sehingga banyak kegiatan APBN yang tidak dapat terlaksana karena tidak ada dana pendampingnya. Untuk selanjutnya perlu ada sinkronisasi antara APBD dan APBN dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan.
2. Beberapa kegiatan ada pemblokiran dari eselon 1, sehingga memperlambat di dalam pelaksanaan kegiatan. Diperlukan kecermatan di dalam administrasi awal sehingga meminimalisir pemblokiran dari eselon 1.
3. Adanya mutasi eselon yang membawa dampak perubahan Surat Keputusan Personil Satuan Kerja dan menyebabkan keterlambatan di dalam pelaksanaan kegiatan.



4. Adanya efisiensi anggaran dari Pusat, sehingga output yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

A. Dasar Hukum

Pada tahun 2012, ada 4 (Empat) Kabupaten / Kota yang menerima Tugas Pembantuan dari dana APBN, yaitu : Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun dasar hukum Tugas Pembantuan dari masing-masing Kabupaten/Kota tersebut adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor DIPA 6512/018-05.4.01/1/9/2012 Tanggal 17 September 2012
- Kabupaten Berau dengan Nomor DIPA 7074/018-05.4.01/19/2012 Tanggal 9 Desember 2011
- Kabupaten Nunukan dengan Nomor DIPA 6174/018-05.4.01/19/2012 Tanggal 9 Desember 2011
- Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor DIPA 5167/018-08.4.01/19/2012 Tanggal 9 Desember 2012

B. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuan Kepada Kabupaten Untuk Provinsi

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada masing-masing Kabupaten / Kota telah sesuai dengan Program yang dicanangkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Adapun program dan kegiatan dari masing-masing Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kutai Timur

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan



- Kegiatan Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan
 - Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
2. Kabupaten Nunukan
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
 - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
3. Kabupaten Berau
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
 - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
4. Kabupaten Penajam Paser Utara
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

C. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran dari Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian pagu anggaran sebagaimana di dalam tabel berikut :



Tabel 4 Pagu Anggaran dan Realisasi Dana APBN Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN KAB. KUTAI TIMUR (05) TP PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	412,253,000	307,084,000	74.49
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	260,653,000	187,622,000	71.98
	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	62,993,000	-	0.00
	Calon Pekebun/Calon Lahan Revitalisasi Perkebunan	62,993,000	-	0.00
	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan	197,660,000	187,622,000	94.92
	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanaman Karet	195,660,000	185,780,000	94.95
	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kebun Sumber Bahan Tanaman	2,000,000	1,842,000	92.10
	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	81,600,000	66,000,000	80.88
	Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan	81,600,000	66,000,000	80.88
	Bantuan Pengadaan Alat Pasca Panen	66,100,000	66,000,000	99.85
	Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring	15,500,000	-	0.00
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	70,000,000	53,462,000	76.37
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	70,000,000	53,462,000	76.37
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan	70,000,000	53,462,000	76.37
	JUMLAH SATKER (05) KAB. KUTAI TIMUR	412,253,000	307,084,000	74.49
	SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. NUNUKAN PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	1,068,966,000	967,790,000	90.54
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	953,900,000	857,524,000	89.90
	Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao)	953,900,000	857,524,000	89.90
	Intensifikasi Kakao (300 Ha)	301,500,000	298,260,000	98.93
	Pemberdayaan Petani	51,000,000	50,636,000	99.29
	Operasional Tenaga Pendamping (TKP/PLP-TKP)	48,450,000	48,450,000	100.00
	Dukungan Gernas	552,950,000	460,178,000	83.22
	Administrasi Kegiatan	48,100,000	31,420,000	65.32
	Pertemuan Koordinasi	55,000,000	25,000,000	45.45
	Pembinaan dan Pengawasan	130,000,000	101,000,000	77.69
	Pengembangan Sistem Database	22,600,000	12,600,000	55.75
	Pengembangan Peningkatan Mutu Kakao	297,250,000	290,158,000	97.61
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	55,066,000	50,766,000	92.19
	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	55,066,000	50,766,000	92.19
	Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan	55,066,000	50,766,000	92.19
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	60,000,000	59,500,000	99.17
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	60,000,000	59,500,000	99.17
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan	60,000,000	59,500,000	99.17
	JUMLAH SATKER (05) KAB NUNUKAN	1,068,966,000	967,790,000	90.54
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN KAB. BERAU (05) TP PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	1,606,956,000	1,345,234,014	83.71
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	1,436,400,000	1,242,704,014	86.52
	Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao)	1,436,400,000	1,242,704,014	86.52
	Rehabilitasi Tanaman Kakao 100 Ha (GERNAS)	583,000,000	553,100,000	94.87
	Intensifikasi Tanaman Kakao 200 Ha (GERNAS)	201,000,000	199,800,000	99.40
	Pemberdayaan Petani	51,000,000	31,920,000	62.59
	A. Pemberdayaan Petani (30 Orang)	36,000,000	16,920,000	47.00
	B. Pasca Panen (25 Orang)	15,000,000	15,000,000	100.00
	Operasional Tenaga Pendamping (TKP/PLP-TKP)	48,450,000	43,450,000	89.68
	Dukungan Gernas (Daerah)	552,950,000	414,434,014	74.95
	Administrasi Kegiatan	48,100,000	23,492,628	48.84
	Pertemuan Koordinasi	55,000,000	-	0.00
	Pembinaan dan Pengawasan	130,000,000	101,590,000	78.15
	Pengembangan Sistem Database	22,600,000	10,800,000	47.79
	Pengembangan Peningkatan Mutu Kakao	297,250,000	278,551,386	93.71
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	100,556,000	41,490,000	41.26
	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	55,066,000	-	0.00
	Pengawasan Kegiatan Revitalisasi di Kabupaten	55,066,000	-	0.00



Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda - Kaltim 2012

	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	45,490,000	41,490,000	91.21
	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan (Kelapa 4 Ha)	41,490,000	41,490,000	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kebun Sumber Bahan Tanaman	4,000,000	-	0.00
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	70,000,000	61,040,000	87.20
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	70,000,000	61,040,000	87.20
	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	70,000,000	61,040,000	87.20
	JUMLAH SATKER (05) KAB BERAU	1,606,956,000	1,345,234,014	83.71
	JUMLAH SATKER (05) TP KAB	3,088,175,000	2,620,108,014	84.84
B	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. PPU (08) TP	2,255,000,000	2,242,949,000	99.47
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN			
	SARANA PERTANIAN	2,255,000,000	2,242,949,000	99.47
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	120,000,000	120,000,000	100.00
	Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	120,000,000	120,000,000	100.00
	Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim di Kab. PPU	120,000,000	120,000,000	100.00
	- Pembangunan Embung / Dam Parit (2 Paket)	120,000,000	120,000,000	100.00
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	2,100,000,000	2,100,000,000	100.00
	Perluasan Areal Holtikultura/Perkebunan/Peternakan	2,100,000,000	2,100,000,000	100.00
	Perluasan Areal Perkebunan (300 Ha)	2,100,000,000	2,100,000,000	100.00
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen			
	Prasarana dan Sarana Pertanian	35,000,000	22,949,000	65.57
	Layanan Perkantoran	35,000,000	22,949,000	65.57
	Administrasi Pengelola Satker	35,000,000	22,949,000	65.57
	JUMLAH SATKER (08) TP KAB PPU	2,255,000,000	2,242,949,000	99.47
	JUMLAH TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) KAB.	5,343,175,000	4,863,057,014	91.01

D. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Dinas Kabupaten/Kota menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Dinas tersebut, baik asset yang pembiayaannya dari APBD maupun asset yang pembiayaannya dari APBN.



BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

A. Balai Tanaman Rempah dan Obat (Bogor)

1.1) Pengendalian Hama Terpadu Melalui SL PHT Murni Komoditas Lada di Kecamatan Muara Badak

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/135/Kpts-Disbun/2012 tanggal 16 April 2012

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD

Jumlah Anggaran : Rp. 750.000,-

Jangka Waktu : 1 (satu) Hari

Output : Peningkatan wawasan dan pengetahuan petani dalam budidaya lada

1.2) Pengendalian Hama Terpadu Melalui SL PHT Murni Komoditas Lada di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/147/Kpts-Disbun/2012 tanggal 30 April 2012

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD

Jumlah Anggaran : Rp. 7.465.000,-

Jangka Waktu : 1 (satu) Hari

Output : Peningkatan wawasan dan pengetahuan petani dalam budidaya lada

1.3) Kunjungan Belajar Pasca Panen Budidaya Lada

Dasar Hukum : -

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)



Sumber : APBD
Jumlah Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Jangka Waktu : 2 (dua) Hari
Output : - Mengenal dan mengetahui cara pemeliharaan
Alsin perontok lada dan Alsin pembubuk lada
- Teknis pembuatan saos lada
- Teknik pembuatan balsem minyak lada
- Bertambahnya pengetahuan petani tentang
diversifikasi hasil panen, sehingga terjadi
peningkatan pendapatan petani.

B. Balai Penelitian Karet Getas (Salatiga)

1.1) Pelatihan Pengendalian OPT Karet

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 188.4/339/Kpts-Disbun/2012 tanggal
19 November 2012
Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)
Sumber : APBD
Jumlah Anggaran : Rp. 9.195.000,-
Jangka Waktu : 3 (tiga) Hari
Output : Peningkatan wawasan dan pengetahuan petani
dalam budidaya tanaman karet

C. Direktorat Jenderal Perkebunan (Jakarta)

1.1) Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 188.4/271/Kpts-Disbun/2012 tanggal
30 Agustus 2012
Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)
Sumber : APBD
Jumlah Anggaran : Rp. 10.015.600,-
Jangka Waktu : 1 (satu) Hari
Output : Peningkatan wawasan pemandu lapang



1.2) Pelatihan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/082/Kpts-Disbun/2012

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD

Jumlah Anggaran : Rp. 6.527.300,-

Jangka Waktu : 3 (tiga) Hari

Output : Meningkatnya SDM dalam penanganan kebakaran lahan dan kebun

1.3) Pertemuan Koordinasi GUP

Dasar Hukum : SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/083/Kpts-Disbun/2012

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD

Jumlah Anggaran : Rp. 13.907.300,-

Jangka Waktu : 3 (tiga) Hari

Output : Adanya solusi dan rumusan dalam penanganan GUP

D. UGM Yogyakarta

1.1) Pertemuan AMDAL

Dasar Hukum : -

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD

Jumlah Anggaran : Rp. 6.748.000,-

Jangka Waktu : 2 (dua) Hari

Output : Meningkatnya SDM tentang PP nomor 27 Tahun 2012

E. PSLH-UGM Yogyakarta

1.1) Pelatihan AMDAL

Dasar Hukum : UGM/CSR/02/E/01

Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)

Sumber : APBD



Jumlah Anggaran : Rp. 64.917.600,-
Jangka Waktu : 5 (lima) Hari
Output : Peningkatan wawasan AMDAL

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

A. PT. Jawsika

1.1) Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Tani

Dasar Hukum : SPK Nomor 027/7099/Prod-2012
Bidang Kerjasama : Konsultan
Sumber : APBD
Jumlah Anggaran : Rp. 173.030.000,-
Jangka Waktu : 8 (delapan) Hari
Output : - Terbangunnya kerjasama petani dalam kelompok
- Petani memahami teknis budidaya kakao sesuai teknis anjuran
Permasalahan : Peserta pelatihan baru mencapai \pm 1.400 KK, yang belum terlatih \pm 1.600 KK
Solusi : Perlu dilakukan pelatihan pada \pm 1.600 KK petani yang belum dilatih pada tahun selanjutnya

B. P.T. Mutu Agung Lestari

1.1) Sosialisasi ISPO

Dasar Hukum : -
Bidang Kerjasama : Pelatihan (Narasumber)
Sumber : -
Jumlah Anggaran : -
Jangka Waktu : 2 (dua) Hari
Output : Meningkatnya SDM tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011

C. Pusat Penelitian Kelapa Sawit

1.1) Uji Rendemen TBS Kelapa Sawit di Wilayah Kalimantan Timur

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2010



Bidang Kerjasama	: Uji / Analisa
Sumber	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 100.000.000,-
Jangka Waktu	: 90 (Sembilan Puluh) Hari
Output	: Tersusunnya tabel hasil pengukuran rendemen CPO dan PK

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

A. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

1.2) Pencacahan Statistik

Dasar Hukum	: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.666/2012 tanggal 26 September 2012
Bidang Kerjasama	: Statistik
Sumber	: APBD
Jumlah Anggaran	: Rp. 98.255.000,-
Jangka Waktu	: September – Desember 2012
Hasil Kerjasama	: - Tersedianya data statistik perkebunan yang realistis - Termonitornya perkembangan data statistik perkebunan - Tersedianya informasi yang akurat dan menyeluruh untuk masing-masing komoditi, sehingga dapat diketahui antara lain : luas dan sebarannya, produksi, pelau usaha yang terlibat dan perkembangan kondisi yang ada
Permasalahan	: Peserta pelatihan baru mencapai \pm 1.400 KK, yang belum terlatih \pm 1.600 KK
Solusi	: Perlu dilakukan pelatihan pada \pm 1.600 KK petani yang belum dilatih pada tahun selanjutnya



BAB V

PENUTUP

Salah satu faktor pendukung penentu sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan pengembangan 1 juta ha adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan baik dalam rangka pembinaan, pemeliharaan maupun pembukaan kebun baru.

Dari seluruh pencapaian program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2012 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih belum sepenuhnya merefleksikan dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah (RKPD dan Renja SKPD), sehingga realisasi program/kegiatan belum dapat dicapai secara optimal.

Untuk peningkatan pencapaian hasil kegiatan dari program yang ada di tahun-tahun berikutnya disarankan agar pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hendaknya disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan yang tidak terprogram hendaknya terkoordinasi dengan baik antara unit-unit kerja terkait, sehingga tidak membebani anggaran belanja secara signifikan yang berakibat kepada penggeseran anggaran atau kegiatan.

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**